

ABSTRAK

Ardiyat. 2024. Analisis Screening dan Monitoring Untuk Menanggulangi Pembiayaan Rahn Bermasalah (Studi Kasus KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai). Pembimbing: Yusuf Asyahri, S.E., M.E

Kata Kunci : *Screening, Monitoring, Pembiayaan Rahn*

BTM Mujahidin Tumbang Sangai adalah salah satu jenis Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) yang dikelola dibawah naungan yayasan Muhammadiyah. Konsep dan cara kerjanya sama dengan BMT pada umumnya. Termasuk juga produk-produk yang ada di dalamnya, baik produk Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Mudharabah, dan Rahn. Pembiayaan rahn salah satu produk yang diminati masyarakat sekitar untuk memberlakukan usaha mikro kecil menengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *sceerining* dan monitoring dalam menanggulangi pembiayaan rahn bermasalah pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai. untuk mengetahui dampak *sceerining* dan monitoring dalam menanggulangi pembiayaan rahn bermasalah pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah *Sceerining* dan monitoring dalam menanggulangi resiko kredit macet pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah pengawasan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai guna untuk mencegah terjadinya kredit macet adalah dengan melakukan *on the spot* atau kunjungan kepada debitur. Survey yang dilakukan oleh pengawas atau *account officer* maksimal 2 kali kunjungan yaitu pertama pada waktu melakukan permohonan kredit dan setelah pencairan kredit. Pengawasan dengan melakukan *on the spot* akan diperoleh data atau informasi yang sebenarnya tujuan dan maksud debitur melakukan permohonan kredit serta untuk memastikan penggunaan dari kredit tersebut. Dampak *sceerining* dan monitoring dalam menanggulangi pembiayaan rahn bermasalah pada KSPPS BMT Mujahidin Tumbang Sangai adalah pengawasan pembiayaan dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan. Dan dapat mengetahui trends of lending suatu asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan tercapai atau terjadi penyimpangan.